

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENJAGA
STABILITAS DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KOTA
BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Reymond Agung Hutabarat
NPP. 31.1001

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: raymondagung29@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, MSi

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Regional Head Election (Pilkada) is a fundamental aspect of Indonesia's local democratic process, granting citizens the right to directly elect their regional leaders. In Batam City, a region with high demographic heterogeneity, the Pilkada process presents potential risks of social friction and horizontal conflict. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) in maintaining regional stability during local elections, identify the obstacles in performing that role, and examine the strategies implemented to ensure a conducive socio-political climate. **Method:** This research employs a descriptive qualitative approach using Biddle and Thomas's role theory as the main framework, supported by theories of political stability and local democracy. Data were collected through in-depth interviews. **Result:** The findings show that Kesbangpol plays a strategic role in promoting national unity, conducting early conflict detection, and educating the public on the importance of maintaining harmony during elections. However, challenges remain, such as limited budget, inadequate human resources, weak inter-agency coordination, and the influence of identity politics. **Conclusion:** Strengthening Kesbangpol's institutional capacity through digital conflict monitoring, increased collaboration with civil society, and expanded political literacy programs to foster a participatory and resilient society against identity-based political provocations.

Keywords: Kesbangpol, Regional Stability, Local Election, Identity Politics, Batam City, Political Education, Conflict Prevention

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dalam proses demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung. Namun, dalam konteks Kota Batam yang memiliki tingkat heterogenitas demografis yang tinggi, proses Pilkada berpotensi memunculkan gesekan sosial dan konflik horizontal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam dalam menjaga stabilitas daerah selama Pilkada, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut, serta

mengkaji strategi yang dilakukan untuk menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran dari Biddle dan Thomas sebagai landasan teoritik utama, serta teori stabilitas sosial-politik dan demokrasi lokal sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol memiliki peran strategis dalam membina wawasan kebangsaan, melakukan deteksi dini konflik, serta menyosialisasikan pentingnya menjaga persatuan selama Pilkada. Meski demikian, peran Kesbangpol masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta pengaruh kuat politik identitas di Masyarakat. **Kesimpulan:** Pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Kesbangpol melalui digitalisasi pemantauan konflik, peningkatan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, serta perluasan program literasi politik untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif dan tahan terhadap provokasi politik identitas. **Kata kunci:** Kesbangpol, Stabilitas Daerah, Pilkada, Politik Identitas, Kota Batam, Edukasi Politik, Pencegahan Konflik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting demokrasi lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai ajang kontestasi politik yang sarat potensi konflik. Kota Batam sebagai wilayah dengan dinamika sosial tinggi dan keragaman etnis yang kompleks, menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap konflik horizontal, terutama menjelang Pilkada (Kharisma, 2017).

Seiring waktu, Pilkada telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia, memperkuat sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang memberi wewenang lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ristyawati, 2020). Dalam konteks otonomi daerah, stabilitas politik lokal harus dijaga oleh lembaga yang memiliki jaringan ke akar rumput dan mampu melakukan pendekatan non-represif, dan itu adalah Kesbangpol (Suradinata, 2021)

Polarisasi politik yang berbasis pada identitas kelompok dapat memperkeruh suasana dan memicu potensi konflik di tengah masyarakat. Batam, dengan latar belakang masyarakatnya yang beragam, menjadi kota yang rentan terhadap isu-isu SARA selama masa kampanye politik. Peran strategis Badan Kesbangpol terletak pada fungsinya sebagai simpul koordinasi antar-stakeholder dalam rangka deteksi dini konflik dan pemetaan potensi kerawanan politik menjelang pilkada (Suradinata, 2020)

Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memegang peranan strategis sebagai fasilitator stabilitas. Fungsi-fungsi seperti pendidikan politik, pembinaan organisasi masyarakat, forum deteksi dini konflik, dan sinergi dengan lembaga penyelenggara pemilu menjadi instrumen penting dalam menciptakan kondusivitas sosial (Fahmi, Wicaksono, & Suryani, 2022).

Namun, dalam praktiknya Kesbangpol menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang adaptif, serta minimnya partisipasi generasi muda dalam proses politik lokal (Hashfi, 2024). Selain itu, penyebaran hoaks, politik uang, dan mobilisasi isu SARA juga turut memperburuk atmosfer Pilkada (Ridhuan, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas peran Kesbangpol Kota Batam dalam menjaga stabilitas daerah selama Pilkada 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan strategi penguatan kelembagaan berdasarkan pendekatan Role Theory dari Biddle dan Thomas (Sarwono, 2013).

Berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Kota Batam mencapai 67,23%, yang menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam

menentukan masa depan kepemimpinan daerah mereka. Keragaman demografis, terutama terkait dengan perbedaan etnis, agama, dan golongan, sering kali menghadirkan tantangan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu contoh nyata adalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam dinamika politik. Penelitian Kharisma (2017) mengungkapkan bahwa isu SARA banyak dimanfaatkan di berbagai platform, termasuk dalam grup WhatsApp yang memiliki anggota multikultural. Isu-isu ini sering kali menjadi titik rawan konflik, di mana keragaman yang ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan politik. Penyebaran isu SARA tidak hanya memicu polarisasi di kalangan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketegangan yang dapat mengancam stabilitas sosial (Kharisma, 2017).

Polresta Barelang menyoroti bahwa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) masih menjadi salah satu potensi kerawanan utama dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Batam. Meskipun upaya pengawasan dan edukasi terus dilakukan, penyebaran informasi yang bernuansa provokatif dan berpotensi memecah belah masyarakat tetap menjadi tantangan serius. Kapolresta Barelang menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan media, dalam mencegah penyalahgunaan isu SARA yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan mengancam integrasi sosial di tengah masyarakat Batam yang multicultural. (Meilina, 2024)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kajian mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas daerah telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, terutama dalam konteks pencegahan konflik sosial dan pembinaan wawasan kebangsaan. Kesbangpol merupakan instrumen penting dalam pengelolaan politik lokal, termasuk dalam mengawal tahapan pemilihan kepala daerah agar tidak menjadi pemicu instabilitas sosial dan keamanan (Suwarsono, 2019). Misalnya, penelitian oleh Florence (2016) di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa peran Kesbangpol lebih difokuskan pada edukasi dan sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan. Begitu pula dalam studi oleh Fahmi et al. (2022) di Provinsi Riau, Kesbangpol berperan dalam membentuk tim penanggulangan konflik sosial dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun demikian, fokus penelitian tersebut belum secara mendalam menelaah dinamika peran Kesbangpol dalam konteks elektoral, khususnya pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kesenjangan yang menjadi dasar penelitian ini terletak pada minimnya studi yang secara spesifik menganalisis peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial-politik selama Pilkada di daerah multikultural seperti Kota Batam. Padahal, Batam merupakan salah satu kota dengan tingkat heterogenitas demografis tertinggi di Indonesia, dengan kerentanan tinggi terhadap politisasi isu SARA, hoaks, dan konflik horizontal saat pesta demokrasi berlangsung (Kharisma, 2017; Wicaksono, 2021). Tantangan ini menuntut peran Kesbangpol yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap potensi konflik politik identitas.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak menggunakan kerangka teori peran secara utuh sebagaimana dikembangkan oleh Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2013), yang menekankan pentingnya analisis terhadap dimensi harapan (expectation), norma (norm), kinerja (performance), evaluasi (evaluation), dan sanksi (sanction). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian di Kota Batam dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran Kesbangpol dalam merespons tantangan Pilkada yang kompleks.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada lima kajian terdahulu yang relevan untuk melihat perkembangan wacana mengenai peran lembaga dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saat Pilkada.

Penelitian yang dilakukan oleh Pagesa dan Sari (2023) berjudul "Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Stabilitas Sosial Budaya di Provinsi Papua Barat Daya" menekankan pentingnya peran aktor lokal non-pemerintah dalam mencegah konflik. Walaupun tidak membahas Kesbangpol secara langsung, penelitian ini memberi gambaran bahwa upaya menjaga stabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga komunitas adat dan budaya. Penelitian ini penting sebagai pembanding, terutama dalam memahami konteks stabilitas yang lebih luas—yakni stabilitas sosial budaya, bukan hanya stabilitas politik elektoral.

Selanjutnya, penelitian oleh Muhammad dan Tonapa (2021) yang berjudul "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan" memberikan perspektif yang lebih fokus kepada aspek internal kelembagaan. Studi ini menemukan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai sangat mempengaruhi efektivitas kerja Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan variabel penting yang juga muncul sebagai salah satu hambatan dalam penelitian di Kota Batam.

Adapun Fahmi, Wicaksono, dan Suryani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Kesbangpol dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau" menggambarkan bagaimana Kesbangpol mengambil langkah-langkah strategis seperti membentuk forum komunikasi, melakukan sosialisasi, dan memperkuat kolaborasi dengan aparat keamanan dalam mencegah konflik sosial menjelang Pilkada. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan konteks Kota Batam, khususnya dalam hal potensi konflik akibat keberagaman masyarakat yang tinggi dan dinamika politik identitas.

Penelitian Florence (2016) yang dilakukan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, bertajuk "Peran Badan Kesbangpol Linmas dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan" mengangkat pentingnya pembinaan nilai-nilai nasionalisme kepada masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa. Fokus utamanya adalah pada aspek ideologis dan edukatif, bukan secara langsung pada konteks Pilkada. Namun, penelitian ini tetap relevan karena memperlihatkan salah satu fungsi utama Kesbangpol, yaitu sebagai lembaga yang bertugas membina kesadaran politik dan kebangsaan masyarakat.

Sementara itu, penelitian Suci Hermiken (2022) dalam "Peran Kesbangpol Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Penanganan Konflik Sosial" secara langsung menyinggung dua fungsi utama yang juga diteliti dalam skripsi ini, yakni pembinaan ormas dan pencegahan konflik. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang turut diimplementasikan di Kota Batam sebagai bagian dari strategi mitigasi konflik menjelang pemilihan kepala daerah.

Dari review penelitian diatas, terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada menjaga stabilitas daerah pada Pilkada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan juga terdapat pada perbedaan lokus tempat dan objek yang penulis ambil yaitu pada Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan objeknya terfokus pada Badan Kesbangpol Kota Batam.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dari tiga aspek utama. Pertama, dari lokasi studi, penelitian difokuskan di Kota Batam yang memiliki keragaman sosial tinggi dan kerentanan konflik identitas selama Pilkada, namun belum banyak dikaji secara ilmiah dalam konteks peran Kesbangpol. Kedua, dari sisi pendekatan teoritis, penelitian ini menggunakan teori peran Biddle & Thomas yang jarang diterapkan dalam studi kelembagaan Kesbangpol, sehingga memberikan perspektif baru dalam menganalisis efektivitas peran institusi. Ketiga, penelitian ini juga menawarkan temuan empiris aktual dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung terhadap berbagai aktor kunci Pilkada, memberikan gambaran konkret peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial-politik lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjaga stabilitas pada pemilihan kepala daerah serta mengetahui faktor penghambat badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjaga stabilitas daerah pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas sosial-politik selama Pilkada 2024 di Kota Batam. Pendekatan ini dianggap sesuai karena fokus utama penelitian adalah pada proses, makna, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2013).

Tabel 3
Operasional Konsep

Judul	Konsep	Dimensi	Indikator
Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjaga Stabilitas Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau	Peran Menurut Biddle dan Thomas pada Sarwono (2013)	<i>Expectation</i> (Harapan)	1. Menunjukkan eksistensi sikap yang kooperatif 2. Mewujudkan harapan sesuai dengan peran yang dimiliki
		<i>Norm</i> (Norma)	1. Adanya peraturan yang jelas 2. Adanya tugas pokok, dan fungsi
		<i>Performance</i> (wujud perilaku)	1. Keikutsertaan pelaku pada peran yang dijalankan 2. Pelaporan informasi hasil kegiatan
			1. Menunjukkan dampak yang sesuai dengan harapan

		<i>Evaluation</i> (penilaian) dan <i>sanction</i> (sanksi)	2. Adanya hasil timbang balik antara penyelenggara dengan peserta 3. Adanya bentuk sanksi dan hukuman
--	--	--	--

Sumber : Sarwono (2013)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan kunci, yang meliputi pejabat Kesbangpol, aparat kepolisian, Bawaslu, tokoh masyarakat, dan camat. Selain itu, observasi langsung dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses Pilkada (Sugiyono, 2018).

Tabel 4
Informan Dalam Kegiatan Wawancara

No.	Jenis Informan	Jumlah	Kriteria	Metode
1	Kepala Badan Kesbangpol	1	Memiliki tanggung jawab dalam pengawasan Pilkada	Purposive sampling
2	POLRI	2	Terlibat dalam koordinasi keamanan selama Pilkada	Purposive sampling
3	Organisasi Masyarakat	3	Memahami kondisi sosial-politik Kota Batam	Purposive sampling
4	Bawaslu	2	Terlibat dalam proses pemilu dan kolaborasi dengan Kesbangpol	Purposive sampling
5	Camat	1	Terlibat dalam koordinasi selama Pilkada	Purposive sampling
Jumlah total informan		9		

Sumber : diolah peneliti, 2025

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan metode triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode yang berbeda agar hasilnya lebih objektif (Moleong, 2017). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994).

Kerangka analisis yang digunakan adalah teori peran (Role Theory) dari Biddle dan Thomas, yang menitikberatkan pada lima dimensi peran: expectation (harapan peran), norm (norma), performance (kinerja), evaluation (penilaian), dan sanction (sanksi). Teori ini membantu mengidentifikasi sejauh mana Kesbangpol menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas daerah secara efektif (Sarwono, 2013).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi, hambatan, dan efektivitas peran Kesbangpol dalam konteks lokal yang kompleks dan multikultural seperti Kota Bata.

Kinerja Kesbangpol dinilai cukup positif oleh berbagai pihak. Namun demikian, ada beberapa

catatan seperti minimnya kegiatan bersifat partisipatif dan kurang masifnya kampanye politik damai di media sosial yang berdampak pada penyebaran informasi keliru di tengah masyarakat.

5. **Sanction (Sanksi dan Akuntabilitas):**

Belum ditemukan mekanisme sanksi formal bagi Kesbangpol apabila peran tidak maksimal, tetapi evaluasi kinerja tetap dilakukan secara administratif oleh Sekretariat Daerah. Di sisi lain, tekanan publik dan pengawasan media menjadi bentuk sanksi sosial yang turut mendorong peningkatan kinerja Kesbangpol.

3.3. **Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran**

Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Kesbangpol Kota Batam dalam menjalankan perannya selama Pilkada 2024 antara lain:

- Keterbatasan Anggaran dan SDM: Anggaran program sosialisasi politik dan deteksi dini konflik dianggap belum mencukupi cakupan kebutuhan daerah yang luas dan heterogen.
- Kurangnya Sinergi Lintas Lembaga: Hubungan antara Kesbangpol dengan lembaga penyelenggara pemilu dan ormas tidak selalu berjalan harmonis, terutama dalam sinkronisasi agenda kegiatan.
- Masifnya Informasi Hoaks dan Politik Uang: Penyebaran informasi palsu serta praktik transaksional politik menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial.
- Rendahnya Partisipasi Generasi Muda: Minimnya keterlibatan pemilih pemula dalam forum pendidikan politik menjadi tantangan dalam membangun budaya demokrasi sejak dini.

Peran Kesbangpol Kota Batam dalam Pilkada 2024 telah dijalankan sesuai fungsi institusionalnya. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial yang cepat berubah. Penguatan sinergi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, dan pendekatan partisipatif menjadi kunci peningkatan kinerja ke depan.

3.4. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Peran ini dijalankan melalui pendekatan edukatif, koordinatif, dan preventif yang difokuskan pada deteksi dini konflik, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai tantangan struktural dan operasional yang menghambat optimalisasi peran tersebut.

Secara teoritis, penggunaan pendekatan *Role Theory* dari Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2013) memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap Kesbangpol (expectation) dengan pelaksanaan aktual di lapangan (performance). Meskipun lembaga ini telah melaksanakan beberapa program edukasi politik, fasilitasi forum antarkelompok, dan penguatan pemantauan sosial, keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi pemuda menjadi kendala utama.

Temuan ini menguatkan hasil studi sebelumnya oleh Anjani et al. (2024) dan Christanto & Prathama (2025) yang menyebutkan bahwa kinerja Kesbangpol sangat tergantung pada kemampuan kolaborasi lintas sektor serta responsivitas terhadap dinamika lokal. Namun, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyoroti konteks Kota Batam yang memiliki keragaman demografis tinggi dan kompleksitas politik identitas yang rentan dimanfaatkan selama kontestasi

elektoral. Tidak banyak studi sebelumnya yang secara spesifik menempatkan Batam sebagai locus kajian dalam bidang stabilitas politik daerah.

Selain itu, dalam konteks sosial-politik digital, temuan penelitian ini menyoroti belum optimalnya peran Kesbangpol dalam merespons penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berkembang di media sosial. Hal ini sejalan dengan peringatan Ridhuan (2023) bahwa tantangan demokrasi lokal tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga di ruang maya yang tidak mudah dikendalikan oleh lembaga konvensional.

Adapun upaya-upaya seperti pelatihan pemilih pemula, penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan pelibatan ormas lokal telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi potensi konflik, meski pelaksanaannya masih parsial dan belum terintegrasi ke dalam kebijakan makro kota. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan peran Kesbangpol sangat tergantung pada tiga faktor utama: kapasitas kelembagaan, dukungan politik, dan adaptasi teknologi informasi.

Dengan demikian, diskusi ini memperlihatkan bahwa Kesbangpol Kota Batam telah menjalankan fungsi strategisnya, namun membutuhkan penguatan secara struktural dan kultural agar dapat menjadi motor utama stabilitas sosial-politik lokal, khususnya dalam konteks Pilkada yang sarat dengan potensi konflik identitas dan polarisasi politik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik di luar fokus utama. Pertama, terdapat kecenderungan apatisisme politik di kalangan pemilih muda yang lebih tertarik pada konten digital ketimbang sosialisasi formal. Hal ini menuntut inovasi dalam pendekatan komunikasi politik oleh Kesbangpol.

Kedua, ditemukan ketimpangan akses informasi antara wilayah pusat dan pinggiran kota. Masyarakat di daerah terpencil kurang terjangkau oleh program edukasi politik, yang menunjukkan perlunya pemerataan distribusi kegiatan.

Ketiga, peran komunitas lokal dan tokoh masyarakat cukup signifikan dalam meredam potensi konflik, namun belum sepenuhnya terlibat secara struktural dalam strategi Kesbangpol.

Keempat, terdapat ketimpangan kapasitas internal antargenerasi pegawai Kesbangpol, di mana pegawai senior unggul dalam pengalaman, dan pegawai muda dalam penguasaan teknologi, tetapi sinergi antar keduanya belum maksimal.

Kelima, terdapat ketergantungan pada legitimasi politik eksekutif, yang menyebabkan beberapa program strategis tertunda pelaksanaannya.

Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi dalam mendukung efektivitas Kesbangpol menjaga stabilitas sosial-politik di era Pilkada modern.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam memiliki peran yang strategis dalam menjaga stabilitas daerah selama pelaksanaan Pilkada 2024. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi edukatif, koordinatif, dan preventif, dengan aktivitas seperti pendidikan politik masyarakat, penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan koordinasi dengan aparat keamanan dan penyelenggara pemilu.

Dengan menggunakan kerangka *Role Theory* dari Biddle & Thomas, ditemukan bahwa dimensi harapan peran (*expectation*) dan pelaksanaan peran (*performance*) telah berjalan cukup

baik. Namun, evaluasi dan sanksi terhadap ketidakefektifan peran masih belum sistematis. Faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, serta dominasi politik identitas turut mempengaruhi kinerja Kesbangpol.

Temuan lain yang relevan adalah munculnya peran informal dari komunitas lokal dalam menjaga stabilitas, rendahnya literasi politik generasi muda, serta belum optimalnya digitalisasi sebagai sarana penyebaran informasi politik yang damai dan inklusif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar pemerintah daerah memperkuat kapasitas Kesbangpol melalui pelatihan aparatur dan peningkatan alokasi anggaran. Sinergi yang lebih erat dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan juga perlu dibangun dalam bentuk forum rutin serta penyusunan rencana aksi bersama menjelang Pilkada. Selain itu, pendekatan komunikasi publik yang lebih modern, seperti pemanfaatan media sosial dan konten visual, harus diterapkan untuk menjangkau kelompok muda dan mencegah apatisisme politik.

Kesbangpol juga disarankan untuk lebih mengakomodasi peran komunitas lokal dalam perumusan strategi stabilisasi daerah, serta mengembangkan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas agar seluruh program kerja dapat dievaluasi secara transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kesbangpol Kota Batam dapat menjalankan perannya secara lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika demokrasi lokal yang semakin kompleks.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Rektor IPDN, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, dan Ketua Program Studi Politik Indonesia Terapan atas dukungan akademik;
- Dosen Pembimbing atas arahan dan bimbingan yang penuh kesabaran;
- Kepala dan staf Kesbangpol Kota Batam atas bantuan selama proses penelitian;
- Para informan dan narasumber yang telah menyediakan data dan informasi;
- Kedua orang tua, keluarga, serta rekan-rekan Praja yang senantiasa memberikan semangat dan doa.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan karya di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktik pemerintahan di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, L. M. I., Irawaty, T., & Wulandari, W. (2024). Peran Kesbangpol dalam Pendidikan Politik Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Praxis*, 12(1), 45–58. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/view/2550>
- Badan Kesbangpol Kota Batam. (2024). Laporan Kinerja Kesbangpol Kota Batam Tahun 2023–2024. Batam: Pemerintah Kota Batam.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Christanto, S. A., & Prathama, A. (2025). *Membangun Kesadaran Politik melalui Peran*

Bakesbangpol. Jurnal Innovative, 11(1), 19–32.
<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/18021>

Fahmi, M., Wicaksono, D. S., & Suryani, A. (2022). Peran Badan Kesbangpol dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 123–134.

Hashfi, M. S. F. (2024). Sosialisasi Politik Kesbangpol Jakarta Selatan terhadap Gen Z. *Jurnal Retorika*, 8(2), 77–90. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/2798>
<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/854008/polresta-barelang-sebut-isu-sara-masih-menjadi-kerawanan-pilkada-batam>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi IPDN*. Jatinangor: IPDN Press.

Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 107–120.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunike/article/view/2107>

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Muhammad, S. (2013). *Strategi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga

Ridhuan, S. (2023). Pendidikan Politik sebagai Alat Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 124–137.
<https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/1601>

Ristyawati, A. (2020). “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Crepido*, 2(2), 85-96.

Wicaksono, A. (2021). "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menjaga Stabilitas Sosial pada Pilkada Serentak". *Jurnal Politik Indonesia*, 10(3), 109-123.

Sarwono, S. W. (2013). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suradinata, E. (2020). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.